

Babinsa dan Demokrasi Pilpres.

Teuku Kemal Fasya

Agak sulit mengharapkan kata-kata *maujud* dalam politik dengan makna yang tepat. Kerap terjadi “retorika berketiak ular” untuk mendefinisikan bagaimana liatnya bahasa politik, tidak langsung menjadi tiang pancang *mental idea*. Janji politik sulit dipegang, hasrat yang kerap lepas dari tangkap.

Baru saja deklarasi damai dilakukan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa di Hotel Bidakara 3 Juni lalu, prahara pemilu presiden (pilpres) malah mulai terlihat. Semangat *fair play* seharusnya juga ada di dunia politik, terkoyak oleh praktik pembelaan korps militer (*esprit de corps*).

Fakta terbaru tentang kegiatan bintang pembina desa (Babinsa) ketika melakukan “survei”. Alih-alih melakukan survei dengan metodologi yang sah, malah menjadi politik mobilisasi untuk mendukung pasangan Prabowo – Hatta Rajasa, seperti terungkap di Jakarta Pusat dan Gunung Kidul (*kompas.com*, 5 Juni). Ini tentu saja menyedihkan, apalagi jika itu adalah bentuk “kreativitas” para prajurit, jalinan psikologis rumit memahami *esprit de corps* untuk “sang jenderal” dalam pertarungan pilpres.

Padahal sang jenderal tertinggi, Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan sinyal agar TNI-Polri bersikap netral dalam Pilpres. Sinyal SBY ini bukan semata “bualan normatif”, tapi juga hasrat kompleks pada dirinya untuk memberikan warisan yang baik di akhir masa jabatan dan menyambung semangat pembangunan yang telah dirintisnya. Pernyataan SBY juga langsung bersambut tambang dengan komitmen Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Menurut Moeldoko, pernyataan presiden itu bukan untuk diwacanakan, tetapi dilaksanakan (*tempo.co*, 5 Juni).

Pernyataan SBY terkait netralitas TNI-Polri bukan saja wujud dari keprihatinan atas parsialitas politik yang berwajah negatif menjelang Pilpres 9 Juli, tapi hendak mengingatkan kembali makna reposisi TNI dalam politik. Secara konstitusional, itu terbaca dari TAP MPR No. VII/2000 agar TNI/Polri bersikap netral, menjauhi politik praktis, dan komit pada penegakan demokrasi dan HAM.

Di masa Soeharto, kata-kata di atas hanya fantasi yang hidup di diskusi aktivis dan akademisi, tapi di era orde reformasi, TAP MPR itu adalah wujud idealisme demokrasi yang seharusnya tidak dicoreng oleh praktik sesat oknum TNI/Polri.

Bagaimana pun, politik Babinsa yang makruf dilakukan di masa Orde Baru jika kembali dijadikan wacana politik akan terlihat sebagai simbol anti-demokrasi. Penanda Babinsa itu hanya menghidupkan kembali peta romantis-historis militer di era Orde Baru. Di masa lalu, instrumentalisasi ABRI menjelang pemilu memberikan siluet horor dan teror kepada masyarakat sipil, kelompok prodemokrasi, dan partai politik “non-pemerintah”. Dengan menghidupkan kembali horor akan melahirkan trauma yang dampaknya bisa meluas.

Kita seharusnya bisa memilah antara dukungan para pensiunan jenderal dengan perilaku para Babinsa. Dukungan yang kini terpola pada dua kubu presiden semisal rombongan Luhut Panjaitan, Fachul Rozi, Sintong Panjaitan dkk pada barisan pendukung Jokowi – JK, dan kelompok Kievlan Zein, Yunus Yosfiah, George Toisutta, dkk ke gerbong Prabowo – Hatta adalah dibenarkan, demokratis, dan legal.

Mereka halal melakukan itu karena berstatus purnawirawan. Proses berkubu itu pun adalah sesuatu yang sehat saja dalam konteks demokrasi. Era reformasi harus ditandai oleh kedewasaan memilih dan tidak dihantui oleh faktor-faktor non-politik. Walaupun bisa saja pilihan terhadap sosok sangat terkait dengan memori masa lalu, terutama berhubungan dengan pribadi Prabowo.

Luhut Panjaitan yang menjadi lulusan terbaik Akademi Militer Nasional (AMN) angkatan 1970 tentu memiliki pandangan tersendiri tentang Prabowo, *the rising star* AMN 1974. Melejitnya nama Prabowo saat itu bukan faktor generik, tapi berbau politis karena menantu Soeharto.

Politik promosi Prabowo yang berlangsung cepat pada 1997, bukan saja membuat AMN angkatan lebih senior (1968-1973) terhambat karir tapi juga instabilitas di dalam tubuh rejim. Menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang menjadi titik paling tidak stabil rejim Orde Baru, Soeharto tentu perlu orang dekat yang bisa menjaganya (Aris Santoso, *Tempo*, 2-28 November 1997).

Ini ditambah dengan munculnya tokoh reformasi di tubuh ABRI saat itu seperti Wiranto yang tidak lagi memberlakukan politik loyalitas buta kepada presiden sang jenderal tertinggi. Akhirnya muncullah pandangan bahwa “tak ada yang sebaik keluarga”. Naiknya Prabowo saat itu menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) memang tak sepi dari

kontroversial. Jabatan itu pun termasuk ringkas dilalui oleh seorang jenderal di Indonesia, hanya dua bulan (20 Maret – 22 Mei 1998). Sebelumnya ia menjabat Danjen Komando Pasukan Khusus (Kopassus)

Fakta ini juga menunjukkan bahwa pilihan Luhut untuk tidak memilih Prabowo, padahal mereka pernah sealumni di Kopassus, memiliki *reason* yang kuat. Kembali memutar bandul sejarah, politik promosi Prabowo yang tidak alamiah menyebabkan angkatan senior terhambat, meskipun angkatan sejawat dan junior Prabowo diuntungkan. Bergabungnya rekan sejawat dan sebagian junior di kubu Prabowo bisa dilihat sebagai wujud terima kasih *esprit de corps* eksklusif. “Prahara Mei 1998” di Solo dan Jakarta (termasuk Semarang) juga ikut menentukan kenapa para senior tidak berada di kubu Prabowo.

Terkait dengan politik Babinsa, pimpinan tertinggi TNI harus bersikap tegas, jangan sampai menjadi setitik nila yang merusak sebelanga susu. Jangan lagi berapologi bahwa itu bagian dari tupoksi Babinsa, karena jelas hal itu tidak dikenal di alam demokrasi.

Kepada para serdadu juga penting dilayangkan pesan, “kesetiaan terbaik kalian adalah kepada bangsa dan negara, dan bukan kepada orang per orang yang bisa mengicuh dan hipnoterapis!” Kita telah melihat banalitas kesetiaan pada kasus Cebongan lalu. Sikap imparialitas harus ditunjukkan, karena kalian adalah alat negara dan bukan alat politik. Jangan terpancing untuk bunuh diri. Harus diakui, di antara institusi keamanan (TNI dan Polri), TNI-lah yang lebih mulus menjalankan peran reformasinya.

TNI adalah aset bangsa yang harus ditinggikan fungsinya, yaitu menjaga keutuhan NKRI dengan kepercayaan kepada pemerintah yang menjalankan peran demokrasi dan HAM. TNI harus juga menjadi komponen bangsa yang bangga melihat negara ini bersaing di dunia internasional sebagai bangsa yang kreatif dan cerdas, bukan sebagai negara tradisional Nusantara yang miopis dan barbarian.

Teuku Kemal Fasya analis politik dan demokrasi.

siperubahan.com, 7 Juni 2014